

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Fernandita Marsela Alom

NPP. 31.1028

Asdaf Kabupaten __, Provinsi __

Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Fakultas Politik Pemerintahan

Email: email@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Ir. Eko Budi Santos, MT

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Community Empowerment is a program owned by the fisheries service as a result of a meeting held with the Head of the Fisheries and Maritime Service in 2017 in Jayapura City. However, work efficiency has not been created for local fishermen. Seeing this, the community empowerment program for fishermen has become the main focus. **Objective:** This research aims to determine the empowerment of fishing communities in Jayapura City, find out what inhibiting factors exist, and find out what efforts can be made to overcome existing inhibiting factors. **Method:** The theory used by researchers is the empowerment theory by Totok Mardikanto with 4 dimensions. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was carried out by interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Results/Findings:** The research carried out obtained results showing that in the implementation of the empowerment of fishing communities in Jayapura City, several obstacles were still faced. There are obstacles faced by fishermen's institutional constraints based on ethnicity, lack of advanced human resources, fishermen's institutional links that are not yet strong, capital distribution is still hampered, and there has been no renovation of the facilities and infrastructure that support the empowerment of fishing communities in Jayapura City. **Conclusion:** The results of this empowerment of the fishing community for the people of Jayapura City have been able to improve the fishermen's economy, but this has yet to be implemented optimally.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Nelayan, Kota Jayapura.

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Pemberdayaan Masyarakat adalah program yang dimiliki oleh dinas perikanan sebagai suatu hasil dari rapat yang dilaksanakan bersama Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada tahun 2017 di Kota Jayapura. Namun, belum terciptanya efisiensi kerja bagi para nelayan sekitar. Melihat

hal ini, maka program pemberdayaan masyarakat bagi nelayan menjadi fokus utama. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat nelayan yang ada di Kota Jayapura, mengetahui apa saja faktor penghambat yang ada, serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat yang ada. **Metode:** Teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori pemberdayaan oleh Totok Mardikanto dengan 4 dimensi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, data yang diperoleh dijadikan uraian, disajikan, dan ditarik kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan yang ada di Kota Jayapura dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala yang masih dihadapi. Terdapat hambatan yang dihadapkan pada kendala kelembagaan nelayan berdasarkan etnis, kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai, sendi-sendi kelembagaan nelayan yang masih tertinggal, penyaluran modal yang masih terhambat, serta belum adanya renovasi terhadap sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Kota Jayapura. **Kesimpulan:** Hasil dari pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura telah mampu meningkatkan perekonomian para nelayan, namun belum dapat diimplementasikan secara optimal.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Masyarakat Nelayan, Kota Jayapura.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim terbesar yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dan memiliki jumlah pulau sebanyak 17.449 pulau, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Dalam Pasal 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, menyatakan negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau lain. Indonesia juga sering disebut sebagai negara kepulauan dikarenakan luas lautan Indonesia 62% dari luas daratan yang ada. Total luas wilayah Indonesia sekitar 5,8 juta kilometer persegi (Prayogo, 2014).

Dengan perairan yang luas, Indonesia memiliki laut yang menghasilkan potensi kelutan dan perikanan sangat banyak, dalam setahun Indonesia dapat menghasilkan 6,4 juta ton dan keanekaragaman sumber daya yang dapat di perbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Indonesia Dikenal Sebagai Negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut tersebar di dunia (Sarif, 2022).

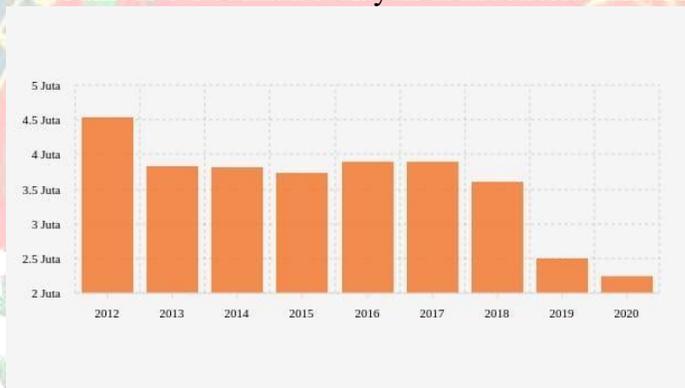
Selain pesisir laut yang digunakan sebagai tempat untuk tinggal dan pemenuhan akan kebutuhan hidup, laut juga dapat menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Kebutuhan akan pangan akan terpenuhi jika pengelolaan akan hasil laut dapat diolah dan diproses dengan baik. Oleh karena laut merupakan sumber mata pencaharian dan pemenuhan pangan masyarakat Indonesia maka kita perlu untuk menjaga kelestarian laut, kebersihan, keutuhan biota laut dan keberlangsungan lingkungan sekitar laut agar dapat digunakan dalam waktu lama dan dapat selalu

memenuhi kebutuhan manusia akan pangan dan juga mata pencaharian untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia (Lubis, 2020).

Nelayan merupakan kelompok masyarakat termiskin dan terpinggirkan dalam strata sosial (Satria & Arif, 2009). Salah satu komunitas bangsa Indonesia yang teridentifikasi sebagai golongan miskin saat ini adalah nelayan, sedikitnya 14,58 juta jiwa atau sekitar 90 persen dari 16,2 juta jumlah nelayan di Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan (Goso, Anwar, & M, 2017) Hal inilah yang menunjukkan bahwa pemberdayaan terhadap masyarakat pinggiran atau yang tergolong miskin sangatlah penting (Permatasari et al., 2020).

Wilayah pesisir merupakan daerah pinggiran pantai yang mana mayoritas penduduk yang berada di sepanjang daerah pesisir ialah nelayan yang berpenghasilan rendah. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diakses pada 2 April 2022 menunjukkan jumlah nelayan laut mengalami stagnasi dan cenderung menurun selama sepuluh tahun terakhir. Pada 2019, jumlah nelayan laut tercatat sekitar 2,1 juta orang. Angka ini turun jika dibandingkan tahun 2018 yang mencapai sekitar 2,3 juta orang.

Gambar 1.1 Jumlah Nelayan di Indonesia Tahun 2012-2020



Dilihat dari data yang ada menunjukkan terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah nelayan yang ada di Indonesia. Jika ditinjau kembali pekerjaan nelayan semakin harinya semakin berkurang karena dinilai tidak menghasilkan pendapatan yang tetap. Selain itu, Undang-Undang cipta kerja dianggap membatasi ruang lingkup mata pencaharian nelayan tradisional atau nelayan kecil. Hal inilah yang menjadikan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan nelayan kecil yang akhirnya mengakibatkan pemenuhan kebutuhan hidup dan populasi nelayan tradisional menurun.

Kota Jayapura merupakan kota yang memiliki Luas sebesar 940 Km² atau 940.000 Ha, terdiri dari 5 distrik, terbagi habis menjadi 25 kelurahan dan 14 kampung. Topografi daerah cukup bervariasi, mulai dari dataran hingga landai dan berbukit atau gunung ± 700 meter di atas permukaan laut. Kota Jayapura dengan luas wilayah 94.000 Ha yang terdiri dari 5 Distrik yaitu Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abepura, Heram dan Muara Tami.

Eksplotasi berlebihan dengan menggunakan alat penangkapan ikan dilarang karena tidak ramah lingkungan sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan perairan, menurunkan jumlah populasi ikan, dan keadaan ini semakin diperparah dengan aktivitas penangkapan ikan ilegal di wilayah pesisir Pantai dan wilayah laut lainnya yang semakin meningkat.



Rumah Nelayan Kota Jayapura

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi lingkungan tempat tinggal nelayan Kota Jayapura belum berkembang. Hasil tangkapan ikan yang bergantung dengan musim menyebabkan pendapatan yang tidak menentu. Para nelayan yang tidak mempunyai pekerjaan sampingan ketika tidak musim ikan, memanfaatkan hasil tangkapan sekali untuk beberapa bulan karena mereka tidak pergi melaut sehingga tidak berpenghasilan.

Oleh karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan rumah dalam hal pemeliharaan dan menjaga lingkungan tempat tinggal sebagian terhambat oleh rendahnya kemampuan ekonomi sehingga membuat masyarakat bersikap acuh dalam menjaga kebersihan. kondisi mencolok yang terlihat di lingkungan pada lingkungan yaitu pemandangan lingkungan tempat tinggal terlihat kotor. Hal ini terlihat dari keadaan laut yang sangat kotor, airnya berwarna keruh kecoklatan dan banyak sampah plastik serta limbah rumah tangga sehingga menimbulkan aroma tidak sedap. Kondisi lain yang terlihat mencolok di lingkungan adalah kondisi bangunan perumahan yang saling berhimpitan antara satu rumah dengan rumah lainnya. Terlihat ganggang yang ada nampak kurang teratur dan rapi. Padatnya perumahan juga menyebabkan masalah sampah akibat aktivitas penghuninya yang terus meningkat. Terlihat sampah yang berserakan di jalan-jalan, sekitar rumah masyarakat dan pantai karena tidak adanya tempat pembuangan sampah. Sampah yang berserakan tersebut menyebabkan estetika lingkungan tempat tinggal menjadi berkurang dan menyebabkan air laut menjadi kotor.

Data Dinas Perikanan Kota Jayapura Sebanyak 80% dari 34.000 nelayan di Papua masih beroperasi dengan perahu kecil yang beratnya kurang dari 5 ton. situasi ini membuat hasil tangkapan nelayan masih rendah, padahal potensi penangkapan ikan di Papua mencapai 8 juta ton per tahun. Ada dua kendala yang dihadapi nelayan Papua yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah, yaitu peralatan penangkapan ikan yang buruk dan perahu motor yang kecil. dua kendala ini membuat para nelayan tidak bisa memanfaatkan potensi penangkapan ikan yang besar di kota Jayapura. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA JAYAPURA”**

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Meskipun Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi perikanan yang sangat besar, kenyataannya pemberdayaan masyarakat nelayan masih menghadapi berbagai kendala signifikan.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa meskipun program pemberdayaan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan telah memberikan dampak positif, masih banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas penangkapan ikan yang memadai. Di Kabupaten Rokan Hilir, misalnya, peningkatan produktivitas perikanan budidaya belum diikuti oleh perbaikan signifikan pada sektor perikanan tangkap. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi program yang lebih holistik dan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi kendala pada nelayan tangkap yang merupakan mayoritas di Indonesia.

Di Kota Jayapura, permasalahan yang dihadapi oleh nelayan lokal semakin kompleks dengan adanya keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan nelayan. Seperti yang diungkapkan dalam penelitian di Kabupaten Deli Serdang, rendahnya partisipasi nelayan dalam program pelatihan dan keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan pemberdayaan. Kota Jayapura menghadapi tantangan serupa, dimana kebijakan dan program yang ada belum mampu secara efektif meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian nelayan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi pemberdayaan yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Selain itu, penelitian terdahulu sering kali fokus pada aspek teknis pemberdayaan seperti peningkatan fasilitas dan pelatihan, namun kurang memperhatikan aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan. Di Kota Jayapura, keberagaman etnis dan budaya nelayan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan. Penelitian sebelumnya di Kecamatan Muara Batu dan Dusun Mamua menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan merupakan hambatan signifikan. Oleh karena itu, pemberdayaan nelayan di Kota Jayapura harus mempertimbangkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

Terakhir, evaluasi dan pengawasan terhadap program pemberdayaan masih menjadi tantangan besar. Penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa kurangnya monitoring dan evaluasi mengakibatkan program pemberdayaan tidak berjalan efektif dan efisien. Di Kota Jayapura, penyaluran modal dan renovasi sarana serta prasarana penunjang belum optimal, sehingga program pemberdayaan tidak memberikan dampak yang signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan mengusulkan upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut, dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat nelayan di Kota Jayapura.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sitorus dan Fatkhullah (2022) dalam jurnal "Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam dan Pengembangan Masyarakat" mengkaji peran dan kontribusi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir dalam pemberdayaan masyarakat nelayan melalui kebijakan dan program kerja dari 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan memiliki lima program utama, yaitu Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, Program Peningkatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Perikanan Tangkap, serta Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan. Program-program ini mampu meningkatkan produktivitas perikanan

budidaya sebesar 6%, dengan peningkatan terbesar pada budidaya ikan kolam sebesar 108%, meskipun terdapat penurunan produktivitas pada budidaya tambak sebesar 24% (Sitorus & Fatkhullah, 2022).

Isir (2022) dalam tesisnya mengkaji peran Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Klaligi, Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan berperan dalam memberikan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan kepada nelayan. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya manusia dan anggaran yang kurang memadai. Program yang dijalankan sangat membantu nelayan dalam modal usaha dan perlengkapan penangkapan ikan (Isir, 2022).

Riza, Padli, dan Harahap (2023) dalam jurnal "J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah" meneliti peran dan upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan terdiri dari nelayan dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tanjungbalai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Dinas Perikanan dan Kelautan dalam pemberdayaan masyarakat nelayan sangat membantu, terutama melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya sumber daya manusia dan anggaran yang kurang memadai (M Syawalun Riza et al., 2023).

Suryadi dan Sufi (2019) dalam jurnal "Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis" mengkaji strategi pemberdayaan masyarakat nelayan di Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini berfokus pada bantuan peralatan nelayan dan hambatan internal serta eksternal dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah adalah dengan memberikan alat tangkap dan boat, melakukan sosialisasi cara penggunaan alat tangkap, serta mekanisme pemberian bantuan. Namun, terdapat kendala seperti kurangnya fasilitas bantuan, sumber daya manusia, dan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan (Suryadi & Sufi, 2019).

Tuasamu (2019) dalam jurnal "Jurnal Academia Praja" meneliti orientasi pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir di Dusun Mamua, Desa Hila, Kecamatan Leihitu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah sering melakukan perencanaan pemberdayaan masyarakat nelayan, namun bantuan yang diharapkan belum terealisasi dengan baik. Hal ini menyebabkan masyarakat nelayan belum mendapatkan bantuan yang memadai untuk meningkatkan taraf hidup mereka (Tuasamu, 2019).

Nainggolan, Hartono, dan Adam (2023) dalam jurnal "Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)" mengkaji peran dan kendala yang dihadapi Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perikanan telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan, namun hasilnya belum optimal. Kendala yang dihadapi meliputi kurangnya jumlah, keahlian, dan kompetensi aparat Dinas Perikanan, rendahnya partisipasi masyarakat nelayan dalam pelatihan, serta keterbatasan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan, serta perencanaan program bantuan yang lebih selektif berdasarkan prioritas kebutuhan nelayan (Nainggolan et al., 2023).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan strategi yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam meningkatkan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap generasi milenial di kawasan yang secara geografis dan demografis memiliki tantangan tersendiri. Sebagai kelompok yang seringkali dianggap apatis terhadap politik, memahami pendekatan yang efektif untuk meningkatkan partisipasi politik milenial di wilayah ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi strategi serupa di daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, generasi milenial menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses informasi yang terbatas dan kesenjangan digital. Penelitian ini menggali upaya Kesbangpol dalam mengatasi hambatan tersebut melalui penggunaan teknologi dan media sosial sebagai alat untuk edukasi politik dan penyebaran informasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai efektivitas strategi digital yang diimplementasikan di daerah dengan infrastruktur yang terbatas, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini juga menekankan pada pentingnya pendekatan budaya dalam strategi peningkatan partisipasi politik. Mengingat keragaman budaya dan etnis di Papua Tengah, Kesbangpol harus mengembangkan program yang sensitif terhadap konteks lokal dan mampu mengakomodasi perbedaan budaya dalam upaya mereka. Kebaruan ilmiah di sini adalah eksplorasi bagaimana adaptasi budaya dapat diintegrasikan ke dalam strategi politik untuk menarik minat generasi milenial, yang merupakan pendekatan yang belum banyak diadopsi dalam studi-studi sebelumnya mengenai partisipasi politik.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mengukur keberhasilan strategi yang diterapkan. Dengan menggunakan metode survei, wawancara mendalam, dan analisis data sekunder, penelitian ini tidak hanya menyediakan data empiris mengenai tingkat partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi partisipasi tersebut. Pendekatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur mengenai strategi partisipasi politik yang berbasis pada bukti empiris, khususnya di wilayah yang kurang terwakili dalam penelitian sebelumnya.

1.5. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang diangkat, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan di Kota Jayapura, termasuk di dalamnya wilayah Pintah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan hambatan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura dalam mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura.

II. METODE

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Menurut (Rijali, 2019) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses penelitian kualitatif ini Upaya upaya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus (Murdiyanto, 2020), tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian kualitatif ini peneliti lakukan dengan membuat data, dan peneliti menjelaskannya dalam menganalisis rumusan masalah yang peneliti temukan di lapangan (L.J Moleong, 2022).

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih berdasarkan peran dan pengetahuan mereka dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura. Informan yang dipilih meliputi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura (1 orang), Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Jayapura (1 orang), Kepala Bidang Usaha Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura (1 orang), Kepala Seksi Bina Usaha Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura (1 orang), Kepala Distrik Jayapura Utara dan Distrik Abepura (2 orang), serta Ketua Kelompok Nelayan di Kota Jayapura (2 orang). Informan-informan ini dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan serta mendalam mengenai proses pemberdayaan masyarakat nelayan di wilayah tersebut. Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk para pemimpin kelompok nelayan, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh informasi yang komprehensif untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Apabila data yang dihasilkan dirasa belum cukup, peneliti juga mempertimbangkan untuk menambah jumlah informan, khususnya dari kalangan nelayan (Bungin, 2007).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai instrumen utama sesuai dengan metode penelitian kualitatif. Peneliti bertanggung jawab untuk menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, mengumpulkan data, menilai kualitas data, menganalisis data, dan menafsirkan hasilnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman wawancara untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan standar penelitian kualitatif. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu lain seperti perekam audio, buku catatan, dan alat dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga memastikan validitas data dengan melakukan triangulasi sumber dan metode, untuk memastikan hasil penelitian yang akurat dan dapat dipercaya (Dr.Sudaryono, 2018).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kota Jayapura Provinsi Papua

1. Bina Manusia

Dalam pelaksanaannya, Dimensi bina manusia mengupayakan agar terciptanya peningkatan terhadap pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat yang dalam pembahasan ini dimaksud adalah masyarakat nelayan di Kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan adanya peningkatan kualitas terhadap masyarakat nelayan di Kota Jayapura. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui tingkat partisipasi masyarakat nelayan, pengelola dan juga masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar juga dapat dikategorikan sebagai organisasi sekitar yang dapat mengatur jalannya pengorganisasian sumber daya manusia sesuai klasifikasinya.

2. Bina Usaha

Pembinaan terhadap usaha juga merupakan faktor yang cukup penting dalam pemberdayaan masyarakat nelayan itu sendiri. Jika sumber daya manusia yang baik dan ditunjang dengan adanya partisipasi yang baik dari masyarakat maka belum tentu dapat dikatakan dapat berjalan dengan baik. Tentunya diperlukannya pembinaan terhadap usaha agar dapat menunjang proses pembinaan manusia. Bina usaha dapat meliputi pemasaran, promosi dan lain – lain.

Dengan adanya Dimensi bina usaha, maka sasaran utama yang perlu dilakukan ialah perencanaan yang cukup jelas. Selain itu, didukung juga dengan sasaran utama dari hasil perikanan ini ialah dengan tercapainya produktivitas hasil tangkap para nelayan dan terbentuknya hubungan kemitraan kerja antar nelayan dan para pengusaha ikan sehingga dapat memperoleh keuntungan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha di Kota Jayapura.

3. Bina Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan merupakan rencana pembangunan jangka panjang yang masuk dalam rencana dari pemerintah daerah Kota Jayapura guna menopang pembangunan masyarakat nelayan. Umumnya lingkungan yang dikenal yakni lungan fisik saja, yaitu lingkungan alam. Namun sebenarnya, terdapat juga lingkungan lain seperti lingkungan sosial. Lingkungan sosial di dalam masyarakat juga merupakan hal yang cukup penting dikarenakan didalamnya terdapat hubungan baik dari segi kerjasama hingga interaksi sosial antar masyarakat itu sendiri. Dengan adanya hubungan antar masyarakat dan juga kerjasama yang baik antar pihak nelayan, ketua kelompok maupun pemerintah diharapkan dapat menjadi salah satu dari faktor yang mendukung keberhasilan terhadap pemberdayaan nelayan itu sendiri.

Lingkungan fisik maupun lingkungan sosial perlu untuk diperhatikan, baik dari segi lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakat yang ada disekitar pantai yaitu masyarakat nelayan di Kota Jayapura. Hal ini dikarenakan lingkungan alam berarti sumber daya ada disekitar pesisir seperti laut, lingkungan alam, budaya masyarakat terhadap pembuangan sampah secara liar ke pesisir pantai. Selain itu, lingkungan sosial yang ada melingkupi interaksi yang terjadi antar masyarakat itu sendiri, hal inilah yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan di Kota Jayapura.

4. Bina Kelembagaan

Dalam Mardikanto (2013:116) disebutkan bahwa kelembagaan sebagai suatu perangkat umum yang ditaati oleh anggota suatu komunitas/masyarakat. Kata kelembagaan sering dihubungkan dengan dua pengertian, yaitu pranata sosial/sosial institution dan organisasi sosial/sosial *organization*. Efektifitas suatu kelembagaan pun disebabkan oleh adanya keberhasilan dari pembinaan kepada manusia, usaha, lingkungan serta kelembagaan itu sendiri.

3.2. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Jayapura Provinsi Papua Aliansi Politik

Dalam proses pemberdayaan masyarakat nelayan melalui penguatan kelembagaan dan permodalan terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi, sehingga menjadi beberapa faktor yang

menjadi kendala dalam meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan diantaranya sebagai berikut.

1. Kurangnya Pengetahuan dan Kemampuan dari Masyarakat Nelayan

Sumber daya manusia yang baik tentunya akan menjadikan suatu peningkatan dalam melakukan suatu pekerjaan atau menjadi patokan sejauh mana pekerjaan tersebut dapat dilakukan. Berbanding terbalik halnya jika kualitas SDM yang ada jika masih jauh dari kata mampu. Dengan berkurangnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, menjadikan perkembangan dalam suatu usaha akan mengalami penurunan bahkan sampai kepada kata kegagalan. Jika kualitas sumber daya manusia menurun maka produksi hasil tangkap akan berkurang jika dibandingkan dengan kualitas manusia yang unggul dari segi pola pikir, kesehatan tubuh bahkan unggul dalam teknologi. Peningkatan sumberdaya manusia yang ada di Kota Jayapura dapat diatasi dengan adanya pemberdayaan melalui pelatihan kepada masyarakat nelayan di Jayapura. Hal ini dapat menjadi satu kunci untuk mengatasi permasalahan yang umumnya terjadi yaitu kualitas sumber daya manusia yang rendah.

2. Pola Pikir dan Pola Kerja dengan Sistem Kekeluargaan

Nelayan merupakan mata pencaharian utama yang digeluti oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir Jayapura. Dalam menjalankan pekerjaan sebagai nelayan, tentunya diperlukan kelompok – kelompok kecil yang mampu untuk memberdayakan dan melanjutkan pekerjaan yang ada. Dimulai dari hasil tangkap hingga proses pemasaran tentunya diperlukan tenaga lebih dari hanya 1 orang ataupun koordinator. Apabila setiap kegiatan yang dilakukan hanya dijalankan oleh satu orang dan bukan kelompok maka tentu akan terjadi banyak kendala.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana merupakan faktor utama sebagai penunjang kelancaran suatu proses pemberdayaan. Tersedianya sarana dan prasarana seperti bantuan perahu, rumah es dekat pesisir pantai, serta dermaga merupakan contoh sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan proses pemberdayaan nelayan dan meningkatkan pendapatan bagi nelayan itu sendiri.

3.3. Upaya Dinas Perikanan dan Kelautan Mengatasi Faktor Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Jayapura Provinsi Papua

1. Memberikan Pelatihan tentang Pemberdayaan Nelayan

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan diperlukan adanya upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang.

2. Melakukan Penyuluhan terhadap Masyarakat Nelayan

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan dengan pola pikir masyarakat dengan sistem kerja menurut kekeluargaan yaitu dengan melakukan pekerjaan dimulai dari mempersiapkan untuk pergi mencari di laut hingga sampai pada proses penjualan dengan sistem kekeluargaan dan juga pembagian hasil yang tidak seimbang.

3. Memperbaiki Sarana Pendukung

Untuk mengatasi hambatan dalam proses pemberdayaan terhadap masyarakat nelayan diperlukan adanya upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu hambatan yang

terjadi dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pemberdayaan kepada nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan mendorong perekonomian yang ada.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sitorus dan Fatkhullah (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Rokan Hilir telah berhasil meningkatkan produktivitas perikanan budidaya dengan program-program seperti Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Budidaya Perikanan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini di Kota Jayapura, di mana program pemberdayaan seperti Bina Manusia, Bina Usaha, Bina Lingkungan, dan Bina Kelembagaan juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas masyarakat nelayan.

Isir (2022) menyoroti peran Dinas Perikanan dan Kelautan di Kota Sorong dalam memberikan pendidikan, pelatihan, dan bantuan modal kepada nelayan. Meskipun demikian, seperti yang juga diidentifikasi dalam penelitian ini, kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, yang dapat mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan.

Riza, Padli, dan Harahap (2023) dalam penelitiannya di Kota Tanjungbalai menunjukkan bahwa pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan. Dalam konteks ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Jayapura untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada nelayan juga sejalan dengan strategi yang dilaporkan dalam penelitian mereka.

Suryadi dan Sufi (2019) mengidentifikasi bahwa salah satu hambatan utama dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Aceh Utara adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hal ini mencerminkan tantangan yang serupa di Kota Jayapura, di mana walaupun upaya penyuluhan dan pendampingan dilakukan, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat nelayan.

Nainggolan, Hartono, dan Adam (2023) menunjukkan bahwa Dinas Perikanan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kabupaten Deli Serdang menghadapi kendala seperti kekurangan jumlah, keahlian, dan kompetensi aparat. Permasalahan ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini di Kota Jayapura, di mana kualitas dan kompetensi SDM dalam pengelolaan program pemberdayaan menjadi kunci keberhasilan yang perlu terus diperbaiki.

Secara keseluruhan, temuan dari penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti pemberdayaan masyarakat nelayan melalui peran Dinas Perikanan dan Kelautan. Meskipun setiap daerah memiliki konteks dan tantangan yang berbeda, pendekatan yang dilakukan dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia, bina usaha, lingkungan, dan kelembagaan secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor penghambat yang menarik dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura. Salah satunya adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang memadai di kalangan masyarakat nelayan, yang berdampak pada pemahaman dan pengelolaan hasil tangkapan serta penerimaan manfaat dari program pemberdayaan

yang diselenggarakan oleh pemerintah. Faktor ini menjadi krusial karena menentukan sejauh mana masyarakat nelayan dapat memanfaatkan program-program yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

Selain itu, pola pikir yang masih terpaku pada sistem kerja berbasis kekerabatan juga menjadi hambatan utama. Hal ini menciptakan dinamika internal di antara kelompok nelayan yang mungkin menghambat efisiensi dan efektivitas dari usaha bersama dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Perlu dilakukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengubah pola pikir ini menjadi lebih terbuka terhadap kolaborasi yang lebih luas dan sistematis dalam pengelolaan hasil tangkapan serta pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura oleh Dinas Kelautan dan Perikanan telah menghasilkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih dihadapi beberapa kendala. Berdasarkan analisis terhadap teori pemberdayaan menurut Mardikanto dan Soebiato, pemberdayaan ini telah mencapai target dengan baik dalam dimensi bina lingkungan dan bina kelembagaan, meskipun masih perlu perbaikan dalam dimensi bina manusia dan bina usaha. Hal ini menunjukkan pentingnya terus meningkatkan pendekatan pelatihan dan pendampingan yang lebih intensif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta usaha ekonomi masyarakat nelayan di Kota Jayapura.

Kendala yang diidentifikasi dalam penelitian ini mencakup kurangnya sosialisasi yang memadai mengenai program pemberdayaan, pola pikir yang masih mengutamakan hubungan kekerabatan dalam sistem kerja, serta kekurangan sarana dan prasarana yang mendukung seperti tempat pelelangan ikan yang memadai dan sarana pengangkutan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, perlu dilakukan langkah-langkah seperti peningkatan penyuluhan yang berkesinambungan, revitalisasi sarana fisik, dan penguatan kerjasama antarinstansi terkait guna mendukung kelancaran dan efektivitas program pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Pertama, fokus penelitian hanya terbatas pada konteks pemberdayaan masyarakat nelayan di Kota Jayapura, sehingga temuan tidak dapat langsung diterapkan secara luas pada konteks yang berbeda. Kedua, penggunaan metode pengumpulan data yang terbatas pada wawancara dan observasi mungkin tidak mencakup semua dimensi dan sudut pandang yang relevan terkait dengan pemberdayaan tersebut. Selain itu, keterbatasan dalam akses terhadap informasi dan data historis juga dapat mempengaruhi analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan di daerah tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian, disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan mengintegrasikan pendekatan lintas disiplin dan memperdalam pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat nelayan di berbagai konteks geografis. Selain itu, penelitian mendatang dapat

mengeksplorasi lebih jauh potensi teknologi digital dalam mendukung pemberdayaan, seperti aplikasi mobile untuk pelatihan dan manajemen usaha, serta menerapkan pendekatan partisipatif yang lebih kuat dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat nelayan di masa depan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pemahaman dan pengembangan partisipasi politik generasi milenial di Kabupaten Mimika. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Dr.Sudaryono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Methode. *Depok: PT RajaGrafindo Persada*.
- Isir, F. M. (2022). Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Klaligi Kota Sorong. *Thesis Diploma*.
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Lubis, N. (2020). PERAN TOKOH MASYARAKAT DALAM PEMEBERDAYAAN KELUARGA NELAYAN DI DESA PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 2(1). <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v2i1.248>
- M Syawalun Riza, Mhd Irwan Padli Nst, & Rahmat Daim Harahap. (2023). Analisis Peran Dinas Perikanan dan Kelautan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Tanjungbalai. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2). <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1375>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Nainggolan, F. R. H., Hartono, B., & Adam, A. (2023). Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan Pesisir di Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3). <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1438>
- Permatasari, L., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PREMI ASURANSI NELAYAN (BPAN) PADA MASYARAKAT PESISIR PANTAI PUGER KABUPATEN JEMBER. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i1.12056>
- Prayogo, E. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui Klinik IPTEK Mina Bisnis (Studi Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Lamongan Dan Di Desa Weru Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1).

- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sarif. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Koja Doi. *Intelektiva*, 3(11).
- Sitorus, S. H., & Fatkhullah, M. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN; PERAN DAN KONTRIBUSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 7(1). <https://doi.org/10.24014/jmm.v7i1.16264>
- Suryadi, A. M., & Sufi, S. (2019). STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN NELAYAN (Studi di Kantor Camat Muara Batu Kabupaten Aceh Utara). *Negotium: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.29103/njiab.v2i2.3062>
- Tuasamu, F. D. (2019). ORIENTASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (NELAYAN) DI DUSUN MAMUA DESA HILLA KECAMATAN LEIHITU. *Jurnal Academia Praja*, 2(01). <https://doi.org/10.36859/jap.v2i01.89>

